BAB II

DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI AUSTRALIA

Australia merupakan bagian dari daratan Gondwana yang kemudian terpisah pada lima puluh juta tahun yang lalu. Daratan Gondwana ini terdiri dari Amerika Selatan, Afrika, India, Australia dan Antartika. Kemudian Australia dan Antartika terpisah menuju selatan dan akhirnya Australia terpisah dari Antartika menuju ke utara. Pada tahun 1606, jauh sebelum kedatangan Kapten James Cook ke Australia, bangsa Belanda sudah lebih dahulu menginjakkan kakinya di sana. Orang Belanda diakui sebagai orang Eropa pertama yang menjelajahi Australia dan kemudian mereka menyebut Australia sebagai '*New Holland*' (The Commonwealth). Namun mereka tidak melakukan eksplorasi lanjut terhadap benua tersebut. Hingga kemudian pada tahun 1770 Kapten James Cook bersama rekannya, Sir Joseph Banks yang merupakan ahli botani mendarat di Botany Bay (sekarang New South Wales).

Berakhirnya perang kemerdekaan Amerika Serikat di tahun 1783 membuat Inggris tidak dapat lagi mendeportasi para tahanan ke Amerika Serikat, sedangkan jumlah tahanan terus bertambah. Kemudian Inggris menjadikan Australia sebagai tempat pengasingan bagi para narapidana. Pada 26 Januari 1788, 11 kapal Inggris berhasil mendarat di Botany Bay dengan membawa penumpang sebanyak 1487. Diantara penumpang tersebut 759 adalah narapidana dan tahanan politik. Sisanya adalah tentara dan petugas rumah tahanan. Banyaknya orang Inggris yang

mendarat pada hari itu membuat 26 Januari ditetapkan sebagai ‘Australia Day’. (Sabari, 1991)

Tahun 1790-an pemukim bebas mulai berdatangan, yaitu warga sipil yang bukan narapidana bermigrasi ke Australia. Pengiriman narapidana ke Australia masih berlangsung hingga tahun 1868. Pada tahun 1850 Inggris mengeluarkan undang – undang yaitu *Australian Colonies Government Act* (Siboro, 2012). Dengan adanya undang – undang ini Inggris memberikan kesempatan bagi koloni – koloni yang ada di Australia untuk mengatur sendiri koloninya tanpa memikirkan hubungannya dengan koloni lainnya. Namun koloni – koloni ini tetap berstatus sebagai koloni dari Australia. Koloni – koloni yang terbentuk antara lain New South Wales, Western Australua, South Australia, Victoria, Tasmania dan Queensland. Seiring berjalannnya waktu pengaturan koloni secara sendiri – sendiri ini menimbulkan kepentingan yang tumpang tindih. Selain itu perlunya keseragaman peraturan guna membatasi datangnya imigran, pembentukan pertahanan keamanan Australia dari negara – negara besar, seperti Jerman, Rusia, Perancis, dan Jepang yang sudah menampakkan ancamannya dengan mendirikan koloni – koloni di pulau – pulau dekat Australia, dan perlunya bangsa Australia memiliki rasa nasionalisme terhadap jati diri bangsa (Hamid, 1999). Kemudian pada akhir abad ke-19 diadakan konvensi untuk membahas penyatuan koloni. Hingga pada 1900 pemerintah Inggris mengeluarkan Undang – Undang yang mengesahkan konstitusi Australia. Pada 1 Januari 1901 konstitusi itu mulai berlaku dan juga merupakan hari terbentuknya *Commonwealth of Australia*.

A. Sejarah Politik Luar Negeri Australia

Sejak awal berdirinya Australia sebagai negara federasi koloni pada tahun 1901 sampai dengan tahun 1942, politik luar negeri Australia masih menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Inggris. Hingga segala kepentingan luar negeri Australia saat itu diwakili dan difasilitasi oleh Inggris. Duta besar Inggris yang bertugas tidak hanya mewakili negaranya namun juga berperan mewakili Australia. (Hamid, Sistem Politik Australia, 1999)

Agar lebih mudah dalam memahami perkembangan politik luar negeri Australia sejak awal berdirinya federasi, perkembangan politik luar negeri Australia dibagi ke dalam 3 fase (Siboro, 2012), yaitu :

1. Sebelum Perang Dunia I

Australia sebagai negara federasi dibawah kekuasaan Inggris, memiliki kebebasan dalam mengatur urusan dalam negerinya. Sedangkan untuk urusan luar negeri Australia masih ditangani oleh Inggris. Rakyat dan pemerintah Australia tidak merasa keberatan akan hal itu. Mereka tetap bangga menjadi bagian dari Kerajaan Inggris. Rasa bangga ini tidak terlepas dari sejarah yang dialami oleh Bangsa Australia. Sebagian besar warga Australia merupakan keturunan Inggris. Hal ini menjadikan Inggris tidak bisa lepas dari kehidupan sosial budaya masyarakat Australia. Tidak hanya itu dalam pertahanan keamanan Australia juga masih sangat bergantung pada Inggris. Inggris merupakan salah satu negara Eropa yang besar dan memiliki wilayah kekuasaan yang luas. Selain itu, armada angkatan laut yang kuat juga dimiliki oleh Inggris. Tak heran jika Australia yang

saat itu belum memiliki pasukan masih bergantung pada Inggris untuk pertahanan keamanannya. Tahun 1907, Australia bersama Kanada dan Selandia Baru mendapatkan status *dominion* dari parlemen Inggris. Dengan adanya status ini, Australia memiliki kebebasan dalam mengatur urusan dalam dan luar negerinya, meskipun tetap memandang Raja atau Ratu Inggris sebagai Raja atau Ratunya. (Siboro, 2012)

Ketika pada tahun 1909 tersebar kabar bahwa Jerman akan membangun 13 buah kapal perang yang seluruhnya akan selesai pada tahun 1912, kemudian Inggris pun berupaya untuk meningkatkan kekuatan angkatan perangnya. Selain itu, Inggris menyetujui rencana pemerintah Australia untuk memiliki angkatan laut sendiri dan bersedia memberikan pinjaman kepada pemerintah Australia. Pelaksanaan pembuatan kapal perang tersebut dilakukan di Inggris. Pada tahun yang sama pemerintah Australia mengeluarkan undang – undang yang disebut *The Defence Act* (Undang – Undang Pertahanan). Kesungguhan pemerintah Australia dalam mempersiapkan pertahanannya terlihat dari dikeluarkannya ketentuan wajib militer bagi warga negara yang memenuhi syarat. Tahun 1913 squadron pertama *Royal Australian Navy* memasuki Teluk Sydney. Adanya peningkatan status Australia menjadi *dominion*, membuat Australia ingin menunjukkan bahwa ia mampu untuk berdiri sendiri dan tidak bersandar lagi pada Inggris. Namun, sampai meletusnya Perang Dunia I Australia belum memiliki perwakilan diplomatik di luar anggota *British Commonwealth of Nations* dan belum menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. (Siboro, 2012)

2. Antara Perang Dunia I dan II

Australia membantu Inggris dalam melawan Jerman beserta sekutunya dalam Perang Dunia I yang berlangsung pada tahun 1914 – 1918. Di kawasan Pasifik, Angkatan Laut Australia yang didukung oleh 2.000 pasukan melawan pasukan Jerman yang berkedudukan di German New Guinea hingga menyerah pada bulan September 1914. Ini merupakan pengalaman berharga bagi Angkatan Laut Australia dalam Perang Dunia I, dengan memburu tujuh kapal perang Jerman yang diketahui berada di Pasifik. (Siboro, 2012)

Kemenangan Angkatan Laut Australia ini menimbukan rasa bangga dan menyadari bahwa Australia pantas untuk sejajar dengan negara lain. Namun Australia juga pernah mengalami kekalahan bersama Inggris dan sekutunya saat melawan Turki untuk merebut wilayah kekuasaan Turki. Pada tanggal 25 April 1915 pasukan gabungan Inggris, Perancis, Australia dan Selandia Baru mendarat di Semenanjung Gallipoli (Kompas, 2017). Turki yang saat itu merupakan salah satu negara terkuat di dunia bersama dengan sekutunya berhasil mengalahkan Inggris dan sekutunya termasuk Australia di dalamnya. Peperangan ini pun memakan banyak korban dari kedua pihak. Hingga saat ini tanggal 25 April diperingati sebagai ‘ANZAC Day’. Hari untuk memperingati pahlawan yang telah gugur. ANZAC (*Australia and New Zealand Army Cops*) merupakan gabungan pasukan Australia dan Selandia baru.

Menurut Bereson dan Rosenblat (1979: 29 dalam Siboro, 2012: 60) tercatat 59.342 orang meninggal dan 211.513 orang menjadi korban dari 331.781 orang prajurit Australia yang ikut ambil bagian dalam Perang Dunia I. Dari data

tersebut dapat dilihat bahwa 6,8% penduduk Australia ikut andil dalam Perang Dunia I. Saat itu penduduk Australia berjumlah 4.875.325 orang. Australia memiliki persentase korban paling tinggi dibandingkan dengan negara – negara lain dari kelompok Inggris yaitu mencapai 64%. (Siboro, 2012)

Pada 28 Juni 1919 Australia ikut menandatangani Perjanjian Versailles. Perjanjian ini adalah perjanjian politik pertama yang ditandatangani oleh pejabat Australia, dan yang dinegosiasikan dengan partisipasi langsung oleh delegasi pemerintah Australia. Ini adalah langkah besar dalam pengakuan Australia sebagai entitas independen dalam hukum internasional. Perjanjian Versailles adalah salah satu dari lima perjanjian yang dirumuskan pada Konferensi Perdamaian Paris sebagai bagian dari negosiasi perdamaian pada akhir Perang Dunia I. Perjanjian Versailles terkait dengan membangun kondisi perdamaian dengan Jerman. Perwakilan Australia di Konferensi Perdamaian Paris adalah Perdana Menteri Billy Hughes, Wakil Perdana Menteri Sir Joseph Cook, dan Letnan Komandan JG Latham, *Royal Australian Naval Reserve*. Sebelum tahun 1919, Pemerintah Australia sering tidak diajak berkonsultasi mengenai perjanjian politik, yang ditandatangani oleh Inggris untuk Dominion-nya. Dengan tiga Dominion Inggris lainnya, Australia termasuk di antara 32 penandatangan Perjanjian, dan anggota pendiri Liga Bangsa-Bangsa yang didirikannya. Status yang baru ditetapkan ini ditunjukkan dalam daftar negara-negara di halaman 18 dari Perjanjian, di mana nama-nama Australia, Kanada, Selandia Baru dan Afrika Selatan menjorok di bawah 'Kerajaan Inggris'. Perjanjian itu mengakui status baru bagi negara-negara ini di antara semua koloni Inggris Raya, karena hanya negara-

negara yang memiliki pemerintahan sendiri sepenuhnya dapat menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa. (Commonwealth of Australia)

Pada *Imperial Conference* tahun 1921 dan 1923, Kanada, Afrika Selatan dan Irlandia mencoba untuk mengajukan status yang lebih independen untuk mengatur kepentingannya sendiri. Ketiga negara koloni tersebut sudah tidak terlalu antusias untuk mendukung kebijakan – kebijakan luar negeri Inggris, terutama dengan adanya krisis yang terjadi pada Inggris dan Turki tahun 1922. Namun, Australia dan Selandia Baru tidak setuju dengan usulan tersebut karena menurut mereka hubungannya dengan Inggris masih penting dalam perlindungan sistem keamanan. Inggris tidak dapat menolak tekanan dari koloni – koloninya, hingga pada 11 Desember 1931 Inggris menyetujui diberlakukannya *Statute of Westminster* (Hillmer, 2006). Dengan adanya *Statute of Westminster* ini berarti adanya kebebasan legislatif bagi koloni – koloni Inggris. Di mana Gubernur Jendral tidak lagi berperan mewakili Pemerintah Inggris di negara – negara tersebut. Sampai tahun 1942 Australia belum juga meratifikasi *Statute of Westminster*. (Hamid, Sistem Politik Australia, 1999)

Adanya *Statute of Westminster* tak membuat Australia lantas melaksanakan politik luar negerinya secara independen. Pada masa Perdana Menteri Scullin dan Lyons, lebih fokus pada urusan dalam negeri terutama pada kebijakan – kebijakan perekonomian dan menyerahkan urusan luar negerinya pada Inggris. Hingga pada masa pemerintahan Menzies di mana pecahnya Perang Dunia II, Australia tetap sigap membantu Inggris melawan Jerman di Eropa. Saat itu Australia masih menggantungkan pertahanan keamanannya pada Inggris.

Australia merasa aman dengan adanya pangkalan Angkatan Laut Inggris di Singapura. Kemudian serangan Jepang di pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour membuat Australia khawatir akan keamanannya ditambah dengan jatuhnya Singapura ke tangan Jepang. Adanya pemboman di kota Darwin dan Inggris yang sibuk dengan urusannya di Eropa membuat Australia memutuskan untuk beraliansi dengan Amerika Serikat untuk menahan serangan dari Jepang.

Pengalaman pada Perang Dunia II ini menyadarkan Australia jika kepentingannya dengan negara – negara barat sangatlah berbeda. Dari segi geografis Australia terletak di selatan dunia yang jauh dari negara – negara barat. Tentunya ancaman musuh pun berbeda dengan negara – negara barat. Tantangan yang dihadapi pun berbeda. Hal ini membuat para pembuat kebijakan politik luar negeri Australia terdorong untuk meninjau kembali kebijakannya, karena kebijakan terdahulu sebelum Perang Dunia II dianggap sudah tidak sesuai (Jatmika S. , 1992).

3. Sesudah Perang Dunia II

Setelah Perang Dunia II, pemerintah Australia memiliki minat baru dalam urusan dunia. Seiring dengan berurusan dengan Jepang dan mendukung kemerdekaan Indonesia selama pemberontakan kolonial melawan Belanda, Australia juga terlibat dalam pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Australia adalah salah satu anggota pendiri UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB), yang didirikan pada 1946 sebagai badan khusus PBB. Tujuan resminya adalah untuk berkontribusi pada perdamaian dan

keamanan global melalui promosi kerja sama internasional di bidang pendidikan, sains, dan budaya. Di bidang-bidang ini, UNESCO bertujuan untuk melestarikan dan memperluas penghormatan dunia terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan kebebasan fundamental yang dikodifikasi dalam Piagam PBB.

Pada periode ini Australia juga mulai bertindak secara independen dalam hubungannya dengan tetangga – tetangganya di Asia. Sebuah tonggak penting datang pada tahun 1950, di Konferensi Persemakmuran pada Urusan Luar Negeri yang diadakan di Kolombo, Sri Lanka. Konferensi ini diadakan untuk fokus pada kebutuhan negara – negara Asia, dan itu menghasilkan pendirian organisasi yang bertujuan untuk mempromosikan upaya antar pemerintah kolektif menuju pembangunan ekonomi dan sosial negara – negara anggota di kawasan Asia-Pasifik. Ini dikenal sebagai *Colombo Plan*.

Pada periode awal Perang Dingin, sentimen anti-komunis mengikis dukungan Buruh di Australia, dan Menzies kembali berkuasa pada tahun 1949. Era Menzies dalam hubungan luar negeri didominasi oleh kesetiaan baru kepada Kerajaan Inggris dan keasyikan dengan ancaman komunis. Pada 1951 Menzies memutuskan untuk mengadakan referendum untuk mengubah konstitusi agar mengizinkannya melarang Partai Komunis. Dr H.V. Evatt, pemimpin partai Buruh, berkampanye menentang proposal ini dengan alasan bahwa ia melanggar kebebasan sipil. Referendum gagal dengan selisih kecil. Menzies juga mempertahankan aliansi erat dengan Amerika Serikat dan mengirim pasukan Australia ke Perang Korea.

Konflik di Korea berasal dari fase penutupan Perang Dunia Kedua, ketika Sekutu menguasai semenanjung Korea (sebelumnya diduduki oleh Jepang), Amerika Serikat dan Uni Soviet membagi tanggung jawab untuk negara tersebut. Pada akhir 1940-an, ketegangan antara kedua wilayah telah meningkat ke titik di mana dua kekuatan militer bermusuhan berkumpul di sepanjang perbatasan. Ketika Korea Utara menyerbu, AS menawarkan dukungan militer ke Korea Selatan, dan Dewan Keamanan PBB meminta semua anggotanya untuk membantu dalam pertahanan melawan serangan Korea Utara. Australia menjawab permintaan ini dengan mengirimkan pasukan. Pemimpin Australia berikutnya seperti Harold Holt terus menjunjung aliansi teguh dengan AS. Holt terkenal karena berkampanye dengan dukungan penuhnya untuk perang di Vietnam.

Pada tahun 1951, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian keamanan yang dikenal sebagai perjanjian ANZUS (Australia, New Zealand and United States) (Jatmika S. , 1992), yang mengatur aliansi militer yang mengikat ketiga negara. Konteks perjanjian ini adalah awal dari Perang Korea dan keinginan AS untuk berdamai dengan Jepang. Dalam konteks Perang Dingin, Cina dan Uni Soviet juga menjadi perhatian pemerintah AS. Pakta ANZUS diterima oleh AS sebagai cara mengamankan keseimbangan kekuatan regional di Pasifik.

Kecenderungan Australia yang menggantungkan pertahanan keamanannya pada Inggris dan Amerika Serikat membuat kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan olehnya lebih condong ke barat. Hal ini tentunya menimbulkan ketidaknyamanan bagi negara – negara tetangga terutama di kawasan Asia Pasifik.

Ini menjadi dilema bagi Australia, di satu sisi Australia harus menjaga hubungan baiknya dengan negara – negara tetangga. Namun di sisi lain Australia harus menjaga kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut, yang merupakan perwujudan dari aliansinya bersama Amerika Serikat. Akibat dari aliansi ini, Australia dituntut untuk berjuang bersama dalam segala kebijakan Amerika Serikat.

Ketergantungan dengan Negara besar membawa Australia pada citra sebagai "pihak asing" di kawasan Asia. Dalam hal perumusan kebijakan pertahanan, terdapat berbagai pilihan-pilihan utama yang selalu menjadi fokus perhatian dari setiap pemimpin Australia. Pertama, apakah Australia harus terus bergantung pada perlindungan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang dinilai dapat memberikan jaminan keamanan bagi Australia. Kedua yaitu apakah Australia perlu membangun sistem pertahanan yang mandiri sehingga diharapkan dapat lebih aktif dalam upaya serta inisiatif di forum internasional. Ketiga yaitu apakah Australia harus bertarung di luar negeri yang berkaitan dengan konsep *Forward Defence* atau Australia harus berperang di dalam negeri yang sesuai dengan konsep *Continental Defence*.

Pada tanggal 18 Oktober 1980, Bob Hawke terpilih ke Parlemen Federal sebagai wakil dari Partai Buruh Australia untuk Wills, Victoria konstituen. Ia memenangkan kursi ini dalam empat pemilu berturut-turut 1983, 1984, 1987 dan 1990. Pada bulan Maret 1983 pimpinan partai Buruh Bob Hawke menggantikan perdana menteri Fraser dari koalisi Partai non Buruh. Bob Hawke merumuskan kebijakan pertahanan dalam sebuah buku putih pertahanan Australia yang dikenal

dengan Defence White Paper 1987. Pada masa itu, Bob Hawke melalui Beazley meminta Paul Dibb untuk meninjau isi, prioritas dan dasar pemikiran dari perencanaan pertahanan yang ingin dirumuskannya dalam kebijakan pertahanan. Dalam laporannya, Dibb menolak konsep *Forward Defence* yang kerap menjadi strategi dasar kebijakan pertahanan Australia sebelumnya, Dibb menawarkan konsep *Continental Defence*.

Konsep *Continental Defence* merupakan strategi kekuatan militer Australia harus dipersiapkan untuk menjaga dan mempertahankan benua Australia dan wilayah yang menjadi bagian dari kepentingan strategisnya, dan Australia tidak perlu melibatkan diri dalam berbagai perang di luar negeri. Bob Hawke menolak saran tersebut dan cenderung menganut konsep ”*Forward Defence Within an Alliance*”, yang artinya pertahanan dengan konsep garis depan yang didalamnya masih terdapat aliansi. Setelah kepemimpinan Bob Hawke, Australia dipimpin oleh Perdana Menteri yang berasal dari Partai Buruh yaitu Paul Keating. Paul Keating mengadopsi kebijakan pertahanan *Defence White Paper* 1987 era Bob Hawke. Kebijakan pertahanan Australia era Paul Keating dikenal dengan *Defending Australia* 1994. Bisa dikatakan tidak ada perubahan berarti dalam kebijakan pertahanan Australia era Paul Keating. *Defending Australia* 1994 berisi tentang rancangan pertahanan yang masih tetap terpaku pada aliansi serta memperluas hubungan dengan Indonesia, yang dianggap merupakan bagian penting di kawasan. *Defending Australia* 1994 era Paul Keating masih tetap terfokus pada aliansi dengan Amerika Serikat, sama halnya dengan kebijakan pertahanan era Bob Hawke. Hanya saja dalam alur pergerakan keamanan,

Australia menilik negara – negara Asia Pasifik sebagai bagian awal dalam tahap pendekatan terhadap kawasan.

B. Arah Politik Luar Negeri Australia Masa John Howard

Pada masa kepemimpinan John Howard pemerintah menghadapi banyak tantangan baru. Memburuknya kondisi di Timor Timur pada tahun 1998 dan keterlibatan Australia dalam Pasukan Internasional di Timor Timur adalah yang pertama dalam serangkaian peristiwa yang mendorong isu-isu kebijakan luar negeri Australia saat itu. Kemudian, serangan teroris di New York dan Washington 11 September 2001 menggemborkan awal dari perang melawan terorisme internasional di mana Australia semakin terlibat. (Mcphail, 2007) Dalam kasus krisis Timor Timur John Howard menanggapi dengan kaku, menyebabkan kerusakan pada hubungan Australia dengan negara-negara tetangga, khususnya, Indonesia. Bukti - buktinya menunjukkan bahwa dia muncul sebagai pemimpin yang berhasil secara elektorial yang berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif dengan khalayak domestiknya. Dia melakukan ini dengan mempertahankan pesan yang jelas, konsisten dan persuasif yang meyakinkan mayoritas pemilih bahwa dia bertindak demi kepentingan terbaik mereka. Dia juga mampu secara bertahap membangun modal politiknya di arena internasional. Komunitas internasional menganggap kepemimpinan Howard atas intervensi Timor Timur sebagai sebagian besar berhasil dan hubungan dekatnya selanjutnya dengan Presiden AS membantu meningkatkan profil internasionalnya.

Australia di masa kepemimpinan John Howard berusaha untuk mengembangkan pertahanan keamanannya. Ancaman yang dianggap

membahayakan untuk Australia saat itu berasal dari utara. Australia rawan menerima ancaman dari utara. Hal ini membuat Australia harus menjalin hubungan yang baik dengan negara tetangganya, terutama Indonesia yang merupakan salah satu negara tetangga terdekat Australia. Pada saat kepemimpinan Paul Keating hubungan Indonesia dengan Australia tampak harmonis, namun ketika John Howard menjadi Perdana Menteri Australia hubungan ini mulai renggang karena Australia mengakui kemerdekaan Timor Timur.

John Howard mencoba membangun kapasitas kompetensi perdagangan dan investasi skala internasional dengan penekanan pada pasar Asia – Pasifik, dapat dijelaskan bahwa pandangan politik luar negeri Australia masa kepemimpinan Howard cenderung mengedepankan pihak swasta sebagai kekuatan terdepan dalam diplomasi internasionalnya. Australia dalam penampilan wajah di dunia internasional memperlihatkan dirinya sebagai wakil kepentingan kolonialisme baru di belahan Asia Tenggara. Salah satu ciri demokrasi di Australia adalah memisahkan antara apa yang menjadi kawasan swasta dari kawasan pemerintah. Wajah politik luar negeri Australia dapat sama sekali berbeda dengan wajah politik swastanya. Dengan dalih swasta, pemerintah Australia dapat melepaskan diri dari tuduhan merongrong negara lain. Peran swasta menjadi garda depan diplomasi yang sangat efektif untuk memperjuangkan agenda-agenda politik sebuah negara (Tangkisan Letug, 2002 dalam Darmawan, 2012). Melalui peran pihak swasta inilah Australia berupaya mengembangkan dirinya sebagai investor dan pelaku perdagangan skala dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini Australia menjadi negara salah satu negara terkaya di dunia. (Darmawan, 2012)

Penahanan laju konflik regional memperlihatkan peran serta Australia terhadap kepentingan perdamaian dunia. Penghapusan senjata pemusnah masal, penanganan arus pengungsi, penurunan kualitas lingkungan, peredaran narkotika dalam jaringan internasional, dan kejahatan transnasional, semuanya menjadi agenda kepedulian Australia terhadap masalah-masalah yang timbul di dunia. Di sini dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Australia tidak hanya pada masalah kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga masalah-masalah lain di luar keduanya. Tindak lanjut dari persoalan ini adalah Australia harus mampu mempromosikan dirinya sebagai negara yang memiliki nilai demokrasi liberal, dan harus pula dapat mengupayakan dirinya agar dapat menarik minat negara-neagar sekitar yang memiliki budaya berbeda. Artinya Di satu sisi Australia harus memperlihatkan jati dirinya sebagai negara dengan pola pikir dan budaya putih, tetapi di sisi lain Australia juga harus mampu menempatkan dirinya yang berbeda tersebut dalam lingkungan Asia Tenggara – Pasifik yang bukan berbudaya putih. (Darmawan, 2012)

Jika disimak masa pemerintahan Howard tersebut, tampaknya masih relevan dengan tiga pilar politik luar negeri Australia. Warna partai Liberal yang konservatif memang terlihat sangat kuat, seperti ketegangan-ketegangan yang muncul akibat sering terjadi kekeliruan dalam persepsi antara pemerintah Australia dengan Indonesia, tetapi juga tradisi penekanan pada pentingnya wilayah regional dan kerjasama dengan negara-negara Asia menjadi salah satu agenda politik luar negeri Australia. Di samping itu, pilar kedua yang merupakan tradisi partai Buruh, juga sedikit terlihat yakni pemahaman terhadap identitas diri suatu bangsa. (Darmawan, 2012)